

ABSTRAK

Rindu Hartoni Capah. NIM. 3103131061. Analisis Spasial Penetapan Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta Konflik yang Timbul di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu Kabupaten Toba Samosir. Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 2016.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1) perbandingan peta Hutan Tanaman Industri (HTI) Kemenhut Tahun 2010 dengan Peta Partisipatif Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu. 2) mengetahui konflik yang timbul di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu disebabkan adanya penetapan Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh Kementerian Kehutanan.

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu Kabupaten Toba Samosir. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Wilayah Hutan Adat yang ada di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu. Sedangkan Masyarakat Adat yakni Masyarakat Adat Tungko Matio dan Masyarakat Adat Tukko Nisolu adalah dijadikan sebagai sumber data atau responden, karena merekalah yang tahu tapal batas hutan adat secara turun-temurun dan bisa menunjukkan secara jelas di lapangan kawasan HTI dan Hutan Adat saling tumpang tindih. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, setelah Peta Kawasan HTI dengan Peta Wilayah Adat di *overlay* dengan menggunakan aplikasi SIG, maka didapatkan perbandingan luas masing-masing peta, yakni: luas Peta Kawasan HTI adalah 2208,36 Ha, sedangkan luas peta Wilayah Adat adalah 2220,16 Ha. Dari hasil perbandingan luas peta tersebut didapatkan selisih luas peta wilayah adat yang tidak ditumpang tindih oleh peta Kawasan HTI yaitu dengan luas 11,8 Ha. Kemudian, setelah dilakukan tumpang peta terhadap peta Administrasi Toba Samosir, menghasilkan beberapa irisan yang menumpang tindih wilayah adat, yakni Desa Pardomuan seluas 4,3 Ha, Desa Parsoburan Barat seluas 1332,09 Ha, Desa Tornagodang seluas 251,1 Ha, dan Desa Lumban Ruhap seluas 35,43 Ha. Akibat tumpang tindih kawasan tersebut menimbulkan konflik di sector kehutan Masyarakat Adat di Wilayah Adat Matio dan Tukko Nisolu dengan pihak perusahaan pemegang konsesi HTI, Instansi Kehutanan, dan Aparat Kemanan di Kabupaten Toba Samosir.